

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber pendapatan Negara Republik Indonesia pada prinsipnya dibagi menjadi dua, yaitu Penerimaan Dalam Negeri dan Hibah. Sumber penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan Internasional, sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) adalah semua penerimaan yang diterima oleh negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya yang bersifat sangat tidak stabil dengan besarnya ketergantungan penerimaan-penerimaan tersebut terhadap faktor eksternal, oleh karena itu penerimaan perpajakan merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan yang terbesar dan terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (<https://dearmandoo.wordpress.com>).

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran dari hasil kerja pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Stabilitas ekonomi makro merupakan salah satu syarat penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi (*sustainable growth*) dan pencapaian sasaran pembangunan. Terjaganya laju inflasi dan stabilitas nilai tukar rupiah merupakan komponen penting yang akan mempengaruhi stabilitas perekonomian dan peningkatan kinerja sumber pertumbuhan ekonomi seperti investor, ekspor, dan konsumsi domestik (*Departemen keuangan RI, 2008*).

Menurut **(Latief, 2002)**, Banyak ekonom mengatakan bahwa tingkat inflasi akan memberikan semacam indikator kemampuan pemerintah dalam mengelola perekonomian. Inflasi ini biasanya ditandai dengan adanya kenaikan harga-harga. Naik turunnya inflasi akan berpengaruh terhadap sumber penghasilan perusahaan dan sumber pendapatan masyarakat. Inflasi berperan penting dalam menentukan kondisi perekonomian, sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari berbagai kalangan khususnya otoritas moneter yang bertanggung jawab mengendalikan inflasi. Inflasi mempengaruhi keputusan-keputusan ekonom seperti penetapan harga dan upah, konsumsi dan investasi. Melalui keputusan-keputusan tersebut, inflasi secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perekonomian. Apabila masyarakat mempersepsikan inflasi tinggi maka akan berpengaruh terhadap perekonomian secara keseluruhan **(Dyahrini dan Rachman, 2012:1)**.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengatakan, pertumbuhan ekonomi Kota Bandung saat ini sudah bagus. Bandung merupakan kota metropolitan, sebagai kota metropolitan, basis pertumbuhan ekonomi berada pada sektor perdagangan. Hal ini berbeda dengan Jawa Barat umumnya yang berbasis pada industri dan pertanian. Karena itu, pemerintah pusat, provinsi, maupun BI bisa membantu untuk mengendalikan inflasi agar daya beli masyarakat tidak turun. Sebab, jika daya beli masyarakat turun, otomatis akan berpengaruh terhadap sektor perdagangan yang akan akan berpengaruh pula terhadap sektor hiburan yang menjadi andalan Kota Bandung **(<http://www.kompas.com>)**.

Pertumbuhan ekonomi yang menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan penduduk suatu daerah atau negara sedangkan pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakekatnya adalah upaya

meningkatkan kapasitas pertumbuhan daerah sehingga mampu menjalankan pemerintahan dengan baik. Pembangunan daerah dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan Sentralisasi
- b. Pendekatan Desentralisasi

Otonomi daerah merupakan pembangunan dengan pendekatan desentralisasi yang erat kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu tujuan utama desentralisasi adalah menciptakan kemandirian daerah. Dalam perspektif ini, pemerintah provinsi (pemprov) diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (*Sidik, 2002*).

Dalam **Undang-undang daerah No. 25 Tahun 1999** dijelaskan bahwa sumber- sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah sah

Yang dimaksud dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut **Undang-undang No. 25 Tahun 1999** adalah:

- a. Hasil Pajak Daerah
- b. Hasil Retribusi Daerah
- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lain yang dipisahkan
- d. Lain-lain Pendapan daerah yang sah

Pendapatan asli daerah idealnya menjadi sumber utama pendapatan lokal. Sumber pendapatan lain relatif fluktuatif dan cenderung diluar kontrol (kewenangan) pemerintah provinsi (**Sidik, 2002; Bappenas 2003**).

Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara oleh karena itu Pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah dimana usaha tersebut tidak lepas dari peran serta dan kontribusi Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah, karena menurut **Suparmoko (1992)**, salah satu penerimaan daerah yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah, karena penerimaan ini sekitar 90% dari pendapatan rutin yang diterima oleh daerah.

Salah satu pajak daerah yang memiliki andil dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah pajak hiburan. Sebagaimana telah diketahui bahwa pajak hiburan menurut **Peraturan Daerah Kota Bandung No. 08 Tahun 2010** adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yaitu semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran yang diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam penyelenggaraan suatu hiburan (**Peraturan Daerah No. 08 Tahun 2010**).

Pemerintah Daerah Kota Bandung nampaknya sudah mulai bergerak untuk mencari dan menggali potensi sumber pendapatan daerah yang memang potensial.

Perkembangan jumlah hiburan di Kota Bandung ini seharusnya menjadi potensi yang sangat bagus bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan fiskal. Untuk itu pemerintah perlu berupaya meningkatkan penerimaan pajak hiburan, agar penerimaan pemerintah terus meningkat sehingga dapat memperlancar pembangunan. Untuk mencapai ini pemerintah harus melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah yang dikelola secara efektif dan efisien. Dengan dasar pertimbangan ini, maka pemerintah Daerah Kota Bandung sebagai pelaksana pemerintahan di daerah secara aktif melakukan upaya pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang salah satunya adalah pajak hiburan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“PENGARUH TINGKAT INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH KHUSUSNYA PAJAK HIBURAN DI KOTA BANDUNG”** (Studi Kasus : Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung).

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas masa masalah yang dapat diidentifikasi :

1. Bagaimana tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap pajak hiburan di Kota Bandung ?
2. Bagaimana tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara parsial terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara simultan terhadap pajak hiburan di Kota Bandung ?
2. Untuk mengetahui pengaruh inflasi dan pertumbuhan ekonomi secara parsial terhadap penerimaan pajak hiburan di Kota Bandung?

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang akurat dan valid, disamping itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan diantaranya:

1. Bagi penulis

Diharapkan dapat mengimplikasikan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan seperti kemampuan teknis dan analisis dalam melakukan pendekatan terhadap suatu masalah dan menambah wawasan tentang analisis pengaruh pelaksanaan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak hiburan.

2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang analisis pengaruh pelaksanaan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak hiburan yang dapat dijadikan sebagai masukan yang berguna untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan.

3. Bagi dunia akademik

Sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan topik sejenis serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.